



2025

RENCANA

AKSI

DINAS KOPERASI, UKM
DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala Rahmat – Nya maka Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini merupakan rincian aksi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran aksi-aksi dalam kegiatan / program kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Rencana Aksi ini kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, 3 Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda,



Jusmaramdhana Alus, SH, MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
A. Visi	2
B. Misi	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	4
BAB III. KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
A. Kebijakan	5
B. Program	7
C. Kegiatan	8
D. Rencana Aksi Capaian Kinerja.....	13
BAB IV. PENUTUP	19
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rencana Aksi Bidang Pemberdayaan usaha mikro	
2. Rencana Aksi Bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi	
3. Rencana Aksi Bidang kelembagaan dan pengawasan	
4. Rencana Aksi Bidang perindustrian	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ir. H. Juanda No.81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113699

SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR

Website : www.diskukmp.samarindakota.go.id Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800 / 02.1 / 100.14

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN RENCANA AKSI (RA)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2025, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Tahun 2025 dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3887 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021)
 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026
 16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tunas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
 17. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 900/028/HK-KS/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda, Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

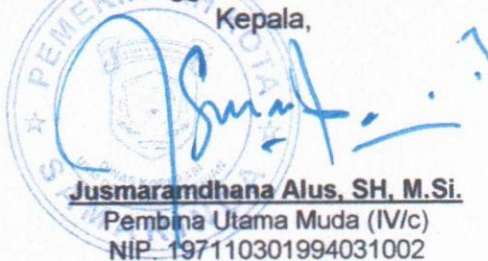
Menetapkan

- Pertama : Rencana Strategis (RENSTRA), Rancangan Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025
- Kedua : Rencana Strategis (RENSTRA), Rancangan Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dictum pertama keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan

Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

- Ketiga : Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja.
- Keempat : Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Februari 2025
Kepala,



Jusmaramdhana Alus, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan program dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan suatu perencanaan yang realistis dan obyektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagai salah satu OPD dibawah Pemerintah Kota Samarinda memandang perlu untuk menyusun perencanaan. Salah satunya adalah Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2025 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan aksi-aksi dalam kegiatan / program selama 1 (satu) tahun ke depan yang akan dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2025 adalah agar :

1. Aksi dalam kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Koordinasi yang baik karena keterkaitan antara bidang dan pelaksana kegiatan.
3. Terlaksananya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disusun dengan memperhatikan visi misi sebagaimana yang tertuang dalam Renstra adalah :

A. VISI

Visi Pemerintah Kota Samarinda adalah **“Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban”**, yang otomatis menjadi Visi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

B. MISI

Misi Pemerintah Kota Samarinda adalah **“Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan” (Misi Kedua : Ekonomi Kota)**, misi di jabarkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan melaksanakan program dan kegiatan yang berupaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, Usaha mikro dan Industri.
Hal ini di titik beratkan pada peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan koperasi, usaha mikro dan industri, yang mana diharapkan dengan hal tersebut maka akan lebih mengoptimalkan dalam hal pembangunan koperasi, usaha mikro dan industri.
2. Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, Usaha mikro dan Industri
Upaya ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro kecil menengah dan suatu usaha nyata dalam pembangunan bidang Koperasi dan Usaha mikro, secara eksplisit ditujukan pada upaya untuk mewujudkan



kesejahteraan rakyat, untuk itu diperlukan pengembangan produk-produk daerah yang berdaya saing

3. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, Usaha mikro dan Industri yang Profesional dan Berkualitas

Hal ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan citra koperasi, membina dan memberdayakan Koperasi agar lebih aktif dan berdaya saing

4. Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, Usaha mikro dan Industri.

Fokus upaya ini adalah dengan Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM pembina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM) demi meningkatkan pelayanan prima. Permasalahan utama dalam pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah belum optimalnya kompetensi dan ketrampilan SDM pembina yang mengikuti diklat teknis

C. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi, sesuatu yang akan dicapai atau menjadi tujuan pada kurun waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan pembangunan subsektor Koperasi, UKM dan perindustrian Kota Samarinda mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan rakyat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan



struktur dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dirumuskan dalam tujuan.

Tujuan Dinas Perindustrian Kota Samarinda yaitu :

1. Meningkatnya Kewitaausahaan Baru
2. Meningkatnya Pembangunan Sektor Tersier

D. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Sasaran memberikan gambaran dan pedoman kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tentang pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu mendatang, dengan tujuan untuk memperoleh kesamaan pola pikir dan tindak pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam rangka peningkatan dan pengembangan perindustrian.

Adapun sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Menumbuhkan dan memberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya Pembangunan Industri



BAB III

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

A. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah merupakan rumusan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar dapat tercapai kelancaran yang terpadu dalam upaya mencapai sasaran, tujuan visi dan misi instansi, dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

I. Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM

- Strategi pertama:
 - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi
Kebijakan :
 - ❖ Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Strategi kedua :
 - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi
Kebijakan :
 - ❖ Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
- Strategi Ketiga :
 - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi
Kebijakan :
 - ❖ Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



- Strategi keempat :
 - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasiKebijakan :
 - ❖ Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Strategi Kelima :
 - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasiKebijakan :
 - ❖ Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
- Strategi Keenam :
 - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan UMKMKebijakan :
 - ❖ Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- Strategi ketujuh :
 - ❖ Pengembangan UMKMKebijakan :
 - ❖ Peningkatan Fasilitas Usaha Mikro

II. Meningkatnya Pembangunan Industri

1. Strategi pertama :
 - ❖ Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM)Kebijakan :
 - ❖ Peningkatan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan industri kecil menengah (IKM)



2. Strategi kedua :

- ❖ Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin usaha industri

3. Strategi ketiga :

- ❖ Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri

Kebijakan :

- ❖ Peningkatan pengembangan sistem informasi industri

B. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 Program yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)



8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota
11. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

C. KEGIATAN

Pada tahun 2025 ini Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda mempunyai rencana kerja :

1. **Sekretariat** mempunyai kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai kegiatan :

- Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.
 - Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
 - Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan.
- Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
 - Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
 - Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

3. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai kegiatan :

- Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam (1) daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



- Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

- Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

4. Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
- Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
 - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.



5. Bidang Perindustrian mempunyai kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
 - Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasaranan industri
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPIU, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



- Sub Kegiatan diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

D. RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA.

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target			
			I	II	III	IV
I.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan pelaku kewirausahaan	500	1000	1500	2000
		Peningkatan Koperasi Sehat	4	8	12	16
II.	Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	2,00	4,00	6,00	7,49

No	Aksi/kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output / Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV					
1	Rapat persiapan Kegiatan Koordinasi					1 Notulen	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Rp. 141.720.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
2	Mendata UMKM					300 UMKM				
3	Koordinasi dengan Pihak Ritel dan Hotel					1 Surat				
4	Mengadakan Pertemuan					1 Pertemuan				
5	Diskusi dan Sharing					200 UMKM				
6	Buat Laporan Hasil Kegiatan					1 Laporan				
7	Rapat persiapan kegiatan sosialisasi					1 Notulen			Fasilitasi kemudahan	Rp. 133.675.000,- (Seratus tiga



No	Aksi/kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output / Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV					
8	Pendataan UMKM yang mendapat fasilitas merk					200 UMKM			perijinan usaha mikro	puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
9	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi fasilitas merk					200 UMKM				
10	Laporan Kegiatan					1 Laporan				
11	Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi					1 Notulen			Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro	Rp. 94.375.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
12	Mendata UKM/BUMRT					240 UMKM				
13	Koordinasi dengan kelurahan					8 Kelurahan				
14	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi					8 Kelurahan				
15	Membuat laporan					1 Laporan				
16	Rapat persiapan kegiatan sosialisasi dan monitoring					1 Notulen			Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.	Rp. 141.947.000,- (Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
17	Mendata UMKM					1000 UMKM				
18	Sinkronisasi dengan pemangku kepentingan					4 Surat				
19	Mendata UMKM yang mengalami permasalahan					50 UMKM				
20	Monitoring dan evaluasi					50 UMKM				
21	Mendata dokumen yang sudah masuk atau terima di MPP					50 UMKM				
22	Mensurvey hasil data yang diterima					50 UMKM				
23	Hasil dari survey menentukan untuk pemberian surat					50 UMKM				
24	Surat rekomendasi diberikan kepada UMKM					50 UMKM				
25	Membuat laporan					1 Laporan				
25	Rapat persiapan kegiatan					1 Notulen			Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Rp. 234.868.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
26	Pembuatan SK kegiatan melibatkan 10 kecamatan					1 SK				
27	Terima data 10 kecamatan					10 Kecamatan				
28	Merekam data 10 kecamatan					10 Kecamatan				
29	Membuat Laporan					1Laporan				
30	Rapat persiapan kegiatan					1 Notulen			Peningkatan pemahaman dan	Rp. 49.082.000,- (empat puluh



No	Aksi/kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output / Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV					
31	Pengumpulan data pelaku usaha mikro					50 pelaku usaha mikro	Program pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kopetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan.	sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah)
32	Pelatihan pelaku usaha mikro					20 pelaku usaha mikro				
33	Penyusunan laporan					2 laporan				
34	Rapat persiapan kegiatan					1 Notulen			Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 239.827.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
35	Pendataan UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi/pemasaran					200 UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp. 224.684.000,- (dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
36	Pelaksanaan kegiatan promosi pameran					300 UMKM				
37	Laporan kegiatan					1 Laporan				
38	Rapat Persiapan kegiatan					1 notulen				
39	Pendataan UMKM yang mendapat fasilitas kemasan					13 UMKM				
40	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kemasan					13 UMKM				
41	Laporan kegiatan					1 laporan				
42	Persiapan kegiatan					1 Notulen	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Rp. 92.853.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
43	Melakukan pelatihan pembuatan izin simpan pinjam untuk koperasi					40 koperasi				
44	Rapat persiapan pembubaran koperasi					1 Notulen	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 187.274.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
45	Menelusuri pengurus koperasi yang akan dibubarkan					124 koperasi				
46	Menginformasikan ke media hasil pembubaran koperasi					1 media				
47	Menyerahkan badan hukum ke kementerian koperasi.					50 koperasi				
48	Rapat bidang					10 Notulen	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 178.429.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
49	Perjadin dinas luar daerah					3 Orang				
50	Bimtek pelatihan koperasi					35 Koperasi				
51	Rapat bidang					8 Notulen			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil	Rp. 194.910.000,- (seratus sembilan puluh empat juta
52	Perjadin dinas luar daerah					10 orang				



No	Aksi/kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output / Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV					
53	Belanja modal					2 unit		kabupaten/kota	Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
54	Pelaksanaan Hari koperasi					1 Kegiatan				
55	Aktivitas lapangan					25 koperasi				
56	Rapat bidang					6 Notulen	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 330.370.000,- (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
57	Bimtek					40 orang				
58	Perjalanan dinas luar daerah					3 orang				
59	Pelaksanaan hari koperasi					224 orang				
60	Jasa Konsultasi					1 Dokumen				
61	Persiapan kegiatan					Notulen Rapat	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (DAK Non Fisik PK2UKM 2022)	Rp. 247.261.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
62	Melakukan pelatihan perkoperasian					Data koperasi dan UKM yang mengikuti bimtek				
63	Rapat Persiapan kegiatan					1 Notulen			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp. 184.270.000,- (Seratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
64	Pengadaan langsung (PL) pekerjaan belanja penyusunan naskah akademik dan raperda RPIK Kota Samarinda					1 dokumen				
65	Rapat konsultasi publik penyusunan naskah akademik dan raperda RPIK Kota Samarinda					2 Notulen				
66	Rapat persiapan FGD naskah akademik dan raperda RPIK Kota Samarinda					1 Notulen				
67	Rapat FGD naskah akademik dan raperda RPIK Kota Samarinda					1 Notulen				
68	Persiapan kegiatan					1 notulen			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya industri	Rp. 400.729.000,- (empat ratus juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
69	Pengumpulan data IKM, kegiatan sertifikasi halal dan merk, dan fasilitasi sertifikasi halal dan merek 2025					100 IKM				
70	Bimtek IKM					60 IKM				
71	Rapat evaluasi kegiatan					1 notulen				



No	Aksi/kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output / Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV					
72	Laporan kegiatan					1 dokumen			Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Rp. 437.405.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu rupiah)
73	Pengumpulan data jumlah pelaku industri					20 pelaku IKM				
74	Revitalisasi penyerahan sarana dan prasarana					45 pelaku IKM				
75	Laporan akhir penyerahan sapras					1 notulen			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Rp. 1.052.422.000,- (Satu milyar lima puluh empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)
76	Rapat Persiapan Kegiatan					96 Orang				
77	Pendataan UMKM yang mendapat fasilitas promosi atau pemasaran					400 IKM				
78	Pelaksanaan kegiatan Promosi Pameran					400 IKM				
79	Laporan kegiatan					1 laporan				
80	Rapat Koordinasi persiapan kegiatan					1 Notulen	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 143.560.000,- (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
81	Monitoring dan pengawasan perizinan dibidang industri					305 pelaku usaha industri				
82	Rapat evaluasi kegiatan					1 Notulen				
83	Melakukan pengumpulan hasil monitoring dilapangan					1 Laporan akhir tahun			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp. 134.015.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
84	Pengumpulan data					2 kegiatan				
85	Rapat persiapan					5 kegiatan				
86	Kunjungan dan verifikasi berkas					1 Dokumen				
87	Fasilitasi SIINas									
88	Laporan kegiatan									
89	Rapat persiapan pendataan IKM di 59 kelurahan					1 notulen	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Rp. 150.672.000,- (Seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
90	Aktivitas lapangan pendataan IKM di 59 kelurahan					295 IKM				
91	Laporan hasil pendataan IKM baru					1 dokumen				



No	Aksi/kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				Output / Keluaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		I	II	III	IV					
									Informasi Industri Nasional (SIINas)	
92	Rapat kegiatan					1 Noulén			Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp. 263.654.000,- (Dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)
93	Pengumpulan data IKM sosialisasi SIINas					30 IKM				
94	sosialisasi SIINas					90 IKM				
95	Rapat evaluasi					1 Noulén				
96	Rapat Persiapan kegiatan					1 kegiatan			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp. 88.549.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)
97	Pemantauan data SIINas					1 kegiatan				
98	Evaluasi kepatuhan pelaku IKM di SIINas					40 kegiatan				
99	Penyusunan laporan					2 kegiatan				



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas secara umum dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Aksi Kinerja ini memiliki peran yang sangat penting didalam pelaksanaan seluruh kegiatan mengingat fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan yang terkait langsung dengan Perjanjian kinerja juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan anggaran.
2. Perencanaan yang baik merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan kecilnya permasalahan atau hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan
3. Harapan kami adalah setiap unsur dari Satuan Kerja benar-benar berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan dengan profesional sehingga benar-benar dapat merealisasikan apa yang telah direncanakan.

Samarinda, 3 Februari 2025
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda



Jusmaramdhana Alus, SH, MSi.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA AKSI BIDANG

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

RENCANA AKSI
BIDANG PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit usaha	10285

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	3000 Unit usaha	1 Rapat persiapan Kegiatan Koordinasi	1 Notulen				Rp141.720.000	
				2 Mendata UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM			
				3 Koordinasi dengan Pihak Ritel dan Hotel		1 Surat				
				4 Mengadakan Pertemuan		1 Pertemuan				
				5 Diskusi dan Sharing		100 UMKM	100 UMKM			
				6 Buat Laporan Hasil Kegiatan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

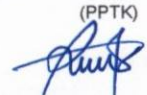


Moh. Rizal. ST. MM.
NIP. 197506162002121005

**RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit usaha	10285

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	1150 Unit usaha	1 Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi	1 notulen				Rp133.675.000	
				2 Pendataan UMKM yang mendapat fasilitasi merk		200 UMKM				
				3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi fasilitasi merk		200 UMKM				
				4 Laporan Kegiatan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Moh. Rizal, ST. MM.
NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit usaha	10285

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	2385 Unit usaha	1. Rapat Persiapan kegiatan sosialisasi 2. Mendata UKM/BUMRT 3. Koordinasi dengan Kelurahan 4. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 5. Membuat Laporan	1 notueln 120 UMKM	120 UMKM 8 Kelurahan			Rp 94.375.000	
						4 Kelurahan	4 Kelurahan	1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

Moh. Rizal, ST, MM.
 NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit usaha	10285

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro.	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	1700 Orang	1 Rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Dan Monitoring 2 Mendata UMKM 3 Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan 4 Mendata UMKM yang mengenai permasalahan 5 Monitoring dan Evaluasi 6 Mendata dokumen yang sudah masuk atau terima (di MPP) 7 Mensurvey hasil data yang diterima 8 Hasil dari survey menentukan untuk pemberian surat 9 Surat Rekomendasi diberikan kepada UMKM 10 Membuat Laporan	1 Notulen 500 UMKM 1 Surat 25 UMKM 20 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 1 Laporan	500 UMKM 1 Surat 20 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM	1 Surat 20 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM 25 UMKM	1 surat 1 surat 1 surat 1 surat 1 surat 1 surat 1 surat 1 surat 1 surat 1 surat	Rp141.947.000	

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


Moh. Rizal, ST. MM.
 NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit usaha	10285

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2000 Unit usaha	1 Rapat Persiapan Kegiatan Pendataan	1 Notulen				Rp234.868.000	
				2 Pembuatan SK Kegiatan melibatkan 10 Kecamatan	1 SK					
				3 Terima Data 10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan		
				4 Merekam data dari 10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	10 Kecamatan		
				5 Membuat Laporan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

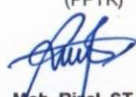


Moh. Rizal, ST, MM.
NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit usaha	10285

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	50 Orang	1 2 3 4					Rp 49.082.000	

Samarinda, 3 Februari 2025
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)

Moh. Rizal, ST, MM.
 NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Program pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Unit usaha	400

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	360 Orang	1. Rapat Persiapan Kegiatan	1 Notulen				Rp239.827.000	
				2. Pendataan UMKM yang mendapat fasilitas promosi/pe	100 UMKM	100 UMKM				
				3. Pelaksanaan Kegiatan promosi pameran	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM			
				4. Laporan Kegiatan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



Moh. Rizal, ST, MM.
NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Program pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Unit usaha	400

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Orang	1 Rapat Persiapan Kegiatan	1 Notulen				Rp224.684.000	
				2 Pendataan UMKM yang mendapat fasilitas kemasan		13 UMKM				
				3 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kemasan		13 UMKM				
				4 Laporan kegiatan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Moh. Rizal, ST, MM.
NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (DESKRANASDA)	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	1. Rapat Persiapan Kegiatan	1 Notulen				Rp 1.052.422.000	
				2. Pendataan UMKM yang mendapat fasilitas promosi atau	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM		
				3. Pelaksanaan kegiatan Promosi Pameran	100 IKM	100 IKM	100 IKM	100 IKM		
				4. Laporan kegiatan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(RPTK)

Moh. Rizal, ST, MM.
NIP. 197506162002121005

RENCANA AKSI
BIDANG PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Presentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Koperasi	60

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit usaha	1 Rapat Bidang 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 Bimtek/Pelatihan Koperasi	3 Notulen 3 Orang 35 Koperasi	3 Notulen 	3 Notulen 	1 Notulen 	Rp 178.429.000	

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


KoUs, SE, M.Si.

NIP. 197109302008012011

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Presentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Koperasi	60

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	25 Unit usaha	1 Rapat Bidang	2 Notulen	2 Notulen	2 Notulen	2 Notulen	Rp 194.910.000	
				2 Perjalanan Dinas Luar Daerah			10 Orang			
				3 Belanja Modal		2 Unit				
				4 Pelaksanaan Hari Koperasi			1 Kegiatan			
				5 Aktivitas Lapangan			25 Koperasi			

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)


Kels, SE, M.Si.

NIP. 197109302008012011

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	Orang	406

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	406 Unit usaha	1 Rapat Bidang		3 Notulen	3 Notulen	3 Notulen	Rp 330.370.000	
				2 Bimtek		40 Orang				
				3 Perjalanan Dinas Luar Daerah			3 Orang			
				4 Pelaksanaan Hari Koperasi			224 Orang			
				5 Jasa Konsultasi		1 Kegiatan				

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PRTK)


Kelsi SE, M.Si.

NIP. 197109302008012011

RENCANA AKSI
BIDANG PENGAWASAN DAN
KELEMBAGAAN

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

KOTA SAMARINDA

TAHUN 2025

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	Koperasi	50

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Facilitasi pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40 Unit usaha	1 Persiapan Kegiatan 2 Melakukan Pelatihan Pembuatan Izin Simpan Pinjam untuk Koperasi	1 Notulen	40 Koperasi			Rp 92.853.000	

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)



Ence Izhar, SE.
NIP. 196702121985031001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Koperasi	248

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	124 Unit Usaha	1 Rapat Persiapan Kegiatan Pembubaran Koperasi 2 Menelusuri Pengurus Koperasi yang akan dibubarkan 3 Menginformasikan ke Media hasil Pembubaran Koperasi 4 Menyerahkan Badan Hukum ke Kementrian Koperasi	1 Notulen	2 Notulen	2 Notulen	31 Koperasi	Rp 187.274.000	
								1 Media		
								50 Koperasi		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)



Ence Izhar, SE.
NIP. 196702121985031001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang, Usaha Kecil dan Menengah	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	270

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	270 Orang	1 Persiapan Kegiatan	1 Notulen				Rp 247.261.000	
				2 Melakukan Pelatihan Perkoperasian		90 Orang	90 Orang	90 Orang		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


Ence Izhar, SE.
 NIP. 196702121985031001

RENCANA AKSI

BIDANG PERINDUSTRIAN

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Rapat Persiapan Kegiatan Pengadaan Langsung (PL) Pekerjaan Belanja Jasa 2 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RPIK Kota Samarinda 3 Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RPIK Kota Samarinda 4 Rapat Persiapan FGD Naskah Akademik dan Raperda RPIK Kota Samarinda 4 Rapat FGD Naskah Akademik dan Raperda RPIK Kota Samarinda		1 Notulen 1 Dokumen			Rp 184,270,000	
							2 Notulen			
							1 Notulen			
							1 Notulen			

Samarinda, 3 Februari 2025
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)


Drs. Hutanto, M.Si.
 NIP. 196705111993121001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Persiapan Kegiatan	1 Notulen				Rp 400.729.000	
				2 Pengumpulan Data IKM Kegiatan Sertifikasi Halal dan Merek						
				dan Fasilitas Sertifikasi Halal dan Merek 2025		100 IKM				
				3 Bimbingan Teknis Bagi Industri Kecil Menengah			60 IKM			
				4 Rapat Evaluasi Kegiatan				1 Notulen		
				5 Laporan Kegiatan				1 Dokumen		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


Drs. Hutanto, M.Si
NIP. 196705111993121001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri	Dokumen	2

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERA NGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pelaku Industri	1 Dokumen	1 Pengumpulan Data Jumlah Pelaku Industri	20 Pelaku IKM				Rp 437,405,000	✓
				2 Revitalisasi Penyerahan Sarana dan Prasarana			45 Pelaku IKM			
				3 Laporan Akhir Penyerahan Sapras				1 Dokumen		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



Drs. Hutanto, M.Si.
NIP. 19670511199312001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Pelaku Usaha Industri	Pengendalian Izin Usaha Industri Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Program	Dokumen	1

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Diawasi	1 Dokumen	1 Rapat Koordinasi perpersiapan Kegiatan		1 Notulen			143.560.000	
				Monitoring dan Pengawasan Perizinan di Bidang Industri	76 Pelaku Usaha Industri	76 Pelaku Usaha Industri	76 Pelaku Usaha Industri	77 Pelaku Usaha Industri		
				3 Rapat Evaluasi Kegiatan				1 Notulen		
				Melakukan Pengumpulan Hasil Monitoring DiLapangan				Laporan Akhir Tahun		

Samarinda, 02 Peruari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



Drs. Hutanto, M.Si
NIP.19670511 199312 1 001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Pelaku usaha Industri yang diawasi	Pelaku Usaha Industri	305

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Pengumpulan data 2 Rapat Persiapan 3 Kunjungan dan verifikasi berkas 4 Fasilitasi SIINas 5 Laporan kegiatan	100 IKM 100 IKM 100 IKM 1 Dokumen	 1 Notulen 	 	 	Rp134.015.000	✓

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

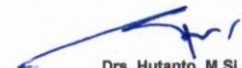

Drs. Hutanto, M.Si.
 NIP. 19670511199312001

**RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri	Dokumen	6

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERA NGAN
					I	II	III	IV		
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Rapat Persiapan Pendataan IKM di 59 Kelurahan 2 Aktivitas Lapangan Pendataan Ikm di 59 Kelurahan 3 Laporan Hasil Pendataan IKM baru	1 Notulen	295 IKM	1 Dokumen		Rp 150,672,000	

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


Drs. Hutanto, M.Si.
 NIP. 19670511199312001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri	Dokumen	6

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Persiapan Kegiatan 2 Pengumpulan Data IKM Sosialisasi SIINas 3 Sosialisasi SIINas 4 Rapat Evaluasi	1 Notulen	30 IKM	60 IKM	1 Notulen	Rp 263.654.000	

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



Drs. Hutanto, M.Si.
NIP. 19670511199312001

RENCANA AKSI
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Meningkatnya Pembangunan Industri	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPK Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri	Dokumen	6

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Rapat Persiapan Kegiatan		1 Notulen			Rp 88.549.000	
				2 Pemantauan Data SIINas		25 IKM	25 IKM			
				3 Evaluasi Kepatuhan Pelaku IKM di SIINas			25 IKM	25 IKM		
				4 Penyusunan Laporan				1 Laporan		

Samarinda, 3 Februari 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)



Drs. Hutanto, M.Si

NIP. NIP. 196705111993121001